



LAPORAN KINERJA

20
25



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Prepared By:
SEKRETARIAT DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKj Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palu, Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. M. MUCHLIS, MM., CGCAE

Pembina Utama Madya
NIP. 19710222 199012 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKj Tahun 2025 merupakan laporan tahun ke-1 dari siklus lima tahunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan LKj Tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada Renstra. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka semua materi dan substansi dalam Renstra, Renja dan LKj Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mengacu sepenuhnya pada Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

LKj Tahun 2025 menyajikan semua Capaian Kinerja dari sasaran dan kegiatan selama tahun 2025. Penilaian Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan atau rencana dalam Renja Tahun 2025 dengan realisasinya.

Untuk penyusunan LKj Tahun 2025 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas yaitu akuntabilitas instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarannya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran OPD 1: Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati, dengan indikator:

- Indeks Kualitas Air

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 125,94% (Sangat Tinggi).

- Indeks Kualitas Udara

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 94,19% (Sangat Tinggi).

- Indeks Kualitas Air Laut

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 107,65% (Sangat Tinggi).

b. Sasaran OPD 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator:

- Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100% (Sangat Tinggi).

C. Sasaran OPD 3: Menurunnya Emisi GRK Yang Terverifikasi Pada Sektor Limbah, dengan indikator :

- Emisi GRK yang terverifikasi pada sektor limbah

Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 94,26% (Sangat Tinggi).

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2025, selama periode tahun anggaran 2025 ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 21 kegiatan dalam 11 program untuk memenuhi sasaran strategis. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran sebesar **Rp. 14.752.846.385,81** - (*empat belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima koma delapan satu rupiah*), dengan relisasi anggaran sebesar **Rp.12.303.823.846,-** (*dua belas milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) atau sebesar 83,40%.

Diharapkan dengan tersusunnya LKj ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.3. Isu-Isu Strategis	16
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP	18

BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	20
2.2. Struktur Program dan Kegiatan	23
2.3. Indikator Kinerja Utama	33
2.4. Perjanjian Kinerja	35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja	37
3.2 Realisasi Anggaran	84
3.3 Inovasi	93
3.4 Penghargaan	93

BAB IV PENUTUP	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

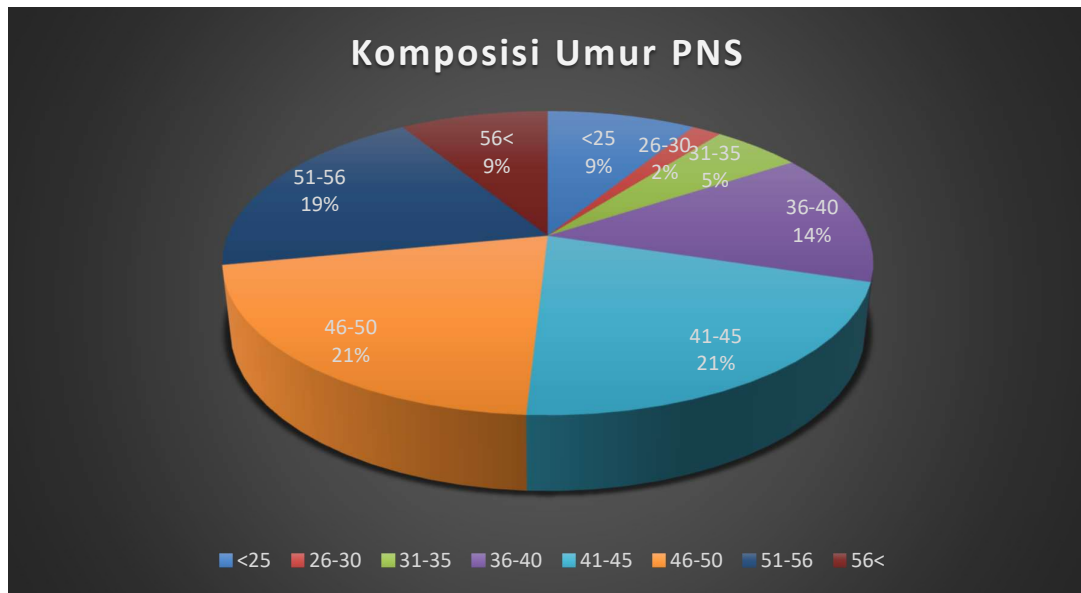
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih dari sekedar pemenuhan kewajiban Instansi Pemerintah, dokumen Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah cermin dari filosofi semangat perbaikan dan peningkatan pelayanan dalam pembangunan bidang lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Selain sebagai bagian dari perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan dari penyusunan dan penyajian LKj DLH 2025 ialah untuk memberikan umpan balik dan atau bahan refleksi bagi perbaikan perencanaan kinerja DLH ke depan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adalah sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Sumber daya manusia yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2024 secara total berjumlah 57 orang terdiri atas 30 orang perempuan dan 27 orang laki-laki dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjumlah 53 orang (25 orang laki-laki dan 28 orang perempuan). Berdasarkan komposisi umur, data PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terdistribusi sebagaimana tercantum pada Grafik 2.1.

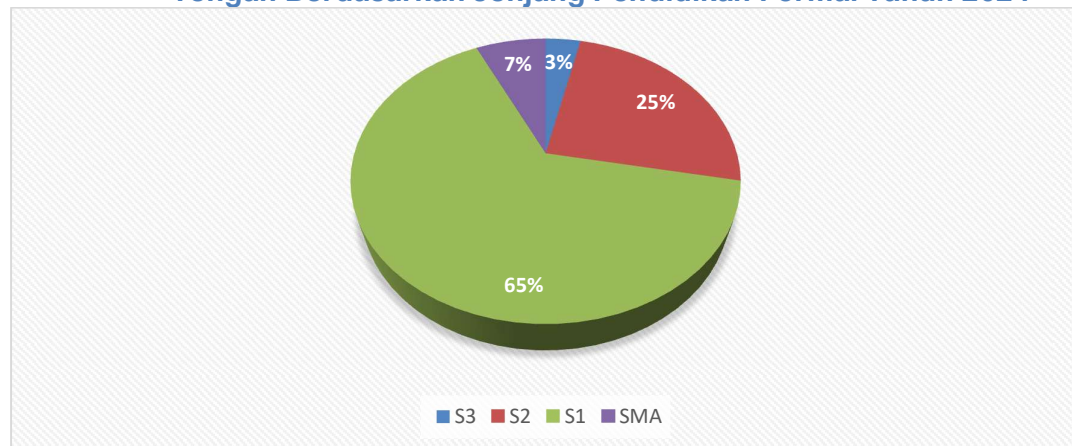
Grafik 2.1. Komposisi Umur PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, Sarjana Strata Satu mendominasi PNS yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yakni 34 orang sebagaimana tersaji pada Grafik 2.2.

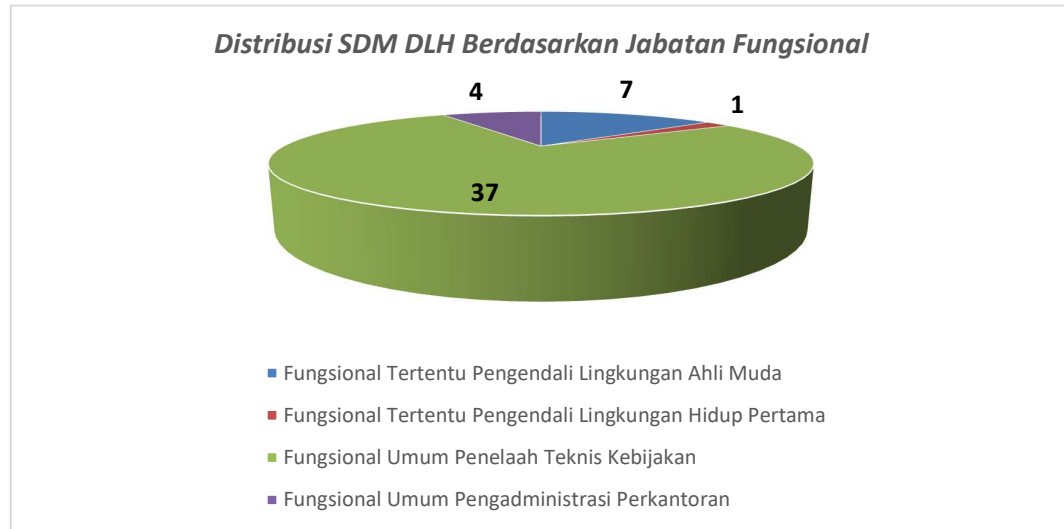
Grafik 2.2. Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2024



Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Sebagaimana Dinas lainnya yang bergerak di bidang khusus, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki jabatan fungsional, baik fungsional khusus dan fungsional umum seperti halnya tercantum pada Grafik 2.3

Grafik 2.3. Distribusi SDM DLH Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional



Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tugas dan fungsinya adalah berbagai asset yang terdistribusi pada berbagai Bidang di Dinas ini sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

a. Tanah dan Bangunan

No	Uraian	Luas Tanah (M ²)	Status Kepemilikan	Kondisi	Keterangan
1	Sebidang Tanah Kantor	--	Milik Pemda Sulteng	--	

No	Uraian	Luas Tanah (M ²)	Status Kepemilikan	Kondisi	Keterangan
2	Bangunan Kantor	1.722.	Milik Pemda Sulteng	Baik	
3	Sebidang Tanah UPT Laboratorium	--	Milik Pemda Sulteng	--	
4	Bangunan Kantor UPT Laboratorium	744	Milik Pemda Sulteng	Baik	

b. Kendaraan Operasional

No	Bidang	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Sekretariat	Roda 4	5 Unit	5	-
		Roda 2	8 Unit	8	-
2	Bidang Tata Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	1 Unit	1	-
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	2 Unit	2	-
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	2 Unit	2	-
5	UPT Laboratorium Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	1 Unit	1	-

c. Perlengkapan Kantor

No.	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
1	Meja Kerja	116	116	-	

No.	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
2	Kursi Kerja	214	177	37	
3	Kursi Tamu	1	1	-	
4	Lemari Besi Tinggi	38	37	1	
5	Dispenser	13	13	-	
6	Komputer	22	22	-	
7	Laptop	30	30	-	
8	Printer	28	28	-	
9	AC Unit	27	27	-	
10	AC Standing	3	3	-	
11	Camera Digital	5	5	-	
12	Video Shooting	2	2	-	
13	Scanner	2	-	2	
14	Mesin Fotocopy	1	-	1	
15	Mesin Potong Rumput	4	4	-	
16	GPS	2	2	-	
17	UPS	19	19	-	
18	CCTV	5	5	-	
19	TV	5	4	1	
20	Drone	1	1	-	
21	Proyektor	1	1	-	

No.	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
22	Sound System	1	1	-	
23	Brankas	2	2		
24	Faksimile	1	1		
25	Hardisk	3	3		
26	Alat Pemadam/Tangga	4	4		
27	<i>Exhaust Fan</i>	4	4		
28	DAP air	2	2		
29	Treng Air	2	2		
30	Profil/Viber Glass	1	1		

Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

d. Alat Laboratorium

No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
1	Neraca Analitik	1	1	-	
2	Spektrofotometer Vis	1	1	-	
3	<i>Spektrofotometer UV-Vis</i>	2	2	-	
4	Oven	2	1	1	
5	<i>Macnetik Stirer With Hot Plate</i>	3	1	2	
6	Baromoeter	1	1	-	
7	Gas Sampler Impinger	1	1	-	
8	<i>pH/ther. Meter Portable</i>	3	2	1	

No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
9	<i>Conductivity/salinity Meter</i>	2	2	-	
10	Turbidimeter	1	1	-	
11	Lemari Asam	1	1	-	
12	<i>Thermoreactor COD</i>	1	1	-	
13	<i>Heating Mantles</i>	2	2	-	
14	Klorinmeter	2	2	-	
15	BOD Inkubator	1	1	-	
16	Flowatch	2	2	-	
17	Pompa Vacuum	2	1	1	
18	Timbangan	1	1	-	
19	<i>Water Purifier</i>	1	1	-	
20	Autoklaf	1	-	1	
21	Inkubator	1	1	-	
22	<i>Laminar Air Flow</i>	1	1	-	
23	<i>Colony Counter</i>	1	1	-	
24	Mikroskop	1	-	1	
25	<i>Depth Sounder</i>	1	1	-	
26	<i>Water Sampler Horizontal</i>	2	1	1	
27	Alat Kebisingan	1	1	-	
28	Kulkas Laboratorium	1	1	-	

No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
29	Anemometer	1	1	-	
30	<i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>	1	-	1	
31	<i>Bench Top pH Meter</i>	1	-	1	
32	CO Meter	1	1	-	
33	Humidifier	1	1	-	
34	<i>Thermohygrometer</i>	10	9	1	
35	<i>Thermohygrometer (Outdoor)</i>	2	2	-	
36	<i>Water Bath</i>	2	2	-	-
37	COD Reaktor	1	1	-	

Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi

Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

Adapun tupoksi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis dengan tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang bidang lingkungan hidup. Unit Pelaksanaan Teknis terdiri atas :

- 1. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- 2. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

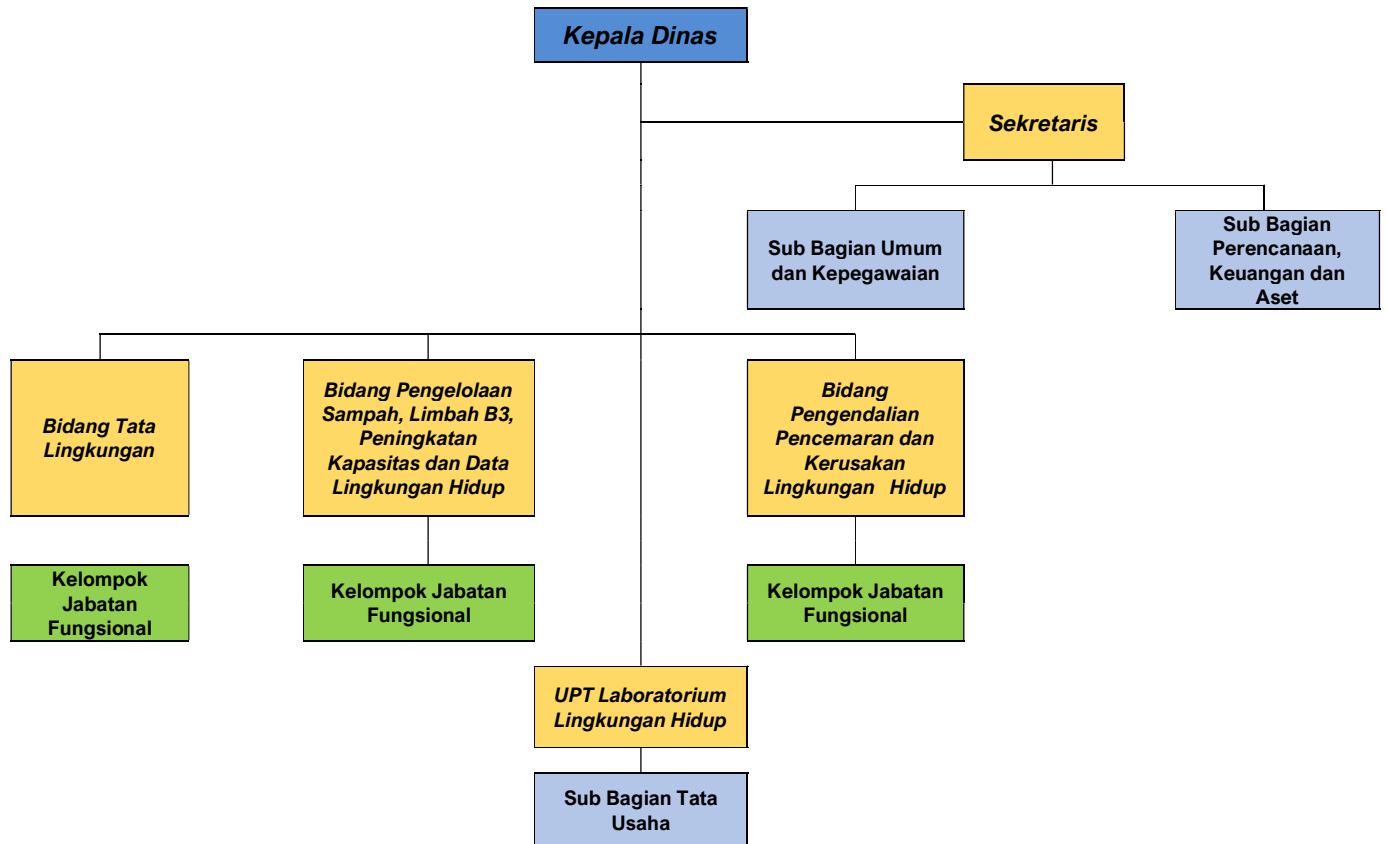
- 1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang laboratorium lingkungan hidup;
- 2. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang laboratorium lingkungan hidup;
- 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut Kepala UPT dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
9. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan

11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadapi adalah :

1. Tingginya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan alih fungsi lahan adalah peningkatan jumlah penduduk, kebijakan alih fungsi lahan, rendahnya "nilai tukar petani", kepemilikan lahan yang sempit. Sementara, faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan kerusakan hutan adalah perambahan, kebakaran hutan, penebangan liar, masih rendahnya pengetahuan dan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah polusi asap yang akhirnya menurunkan kualitas udara.
2. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini;
 - Pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan masih tinggi sehingga meningkatkan volume sampah yang dihasilkan.
 - Perilaku masyarakat masih buruk.
 - Kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih kurang.
 - Belum optimalnya pengelolaan kinerja persampahan.
 - Pengelolaan Tempat Pembuangan/Pemrosesan Akhir (TPA) di kabupaten/kota masih bersifat *open dumping*.
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal belum memadai.

Pengelolaan limbah cair dan padat dari aktivitas pertambangan dan energi (nikel, emas) dan pembangkit listrik (batubara) belum optimal.
3. *Tingginya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir dan laut.*
 Degradasi di wilayah pesisir dan laut disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
 - Eksploitasi berlebihan terhadap mangrove.
 - Konversi mangrove untuk berbagai kepentingan seperti industri, domestik dan aktivitas lainnya.

- Persepsi pengelolaan mangrove belum sama.
- Kurangnya koordinasi dalam tata ruang wilayah
- Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu belum berjalan.

4. *Tingginya tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Sulawesi Tengah.*

Kerusakan DAS berdampak pada meningkatnya kejadian banjir. Faktor-faktor penyebab utama permasalahan ini adalah;

- Erosi, sedimentasi, abrasi dan penyempitan alur sungai masih tinggi.
- Koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai masih kurang.
- Pengelolaan sempadan sungai tidak mengindahkan aturan.
- Ketersediaan air baku untuk kebutuhan penduduk, pertanian, perkebunan dan industri masih rendah.
- Rencana pengelolaan sungai yang terpadu belum berjalan.

5. *Degradasi lahan pertambangan.*

Degradasi lahan pertambangan juga diakibatkan oleh faktor-faktor berikut;

- Eksploitasi bahan tambang tidak mengikuti praktek pertambangan ramah lingkungan (*good mining practices*).
- Desakan ekonomi.
- Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
- Tidak dilaksanakannya reklamasi pasca kegiatan penambangan.
- Pengawasan Galian C masih lemah.
- Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya mineral.

6. *Emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah akibat lemahnya peran para-pihak dalam perubahan iklim.*

Penyebab emisi gas rumah kaca antara lain:

- Kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca masih tinggi.
- Pengaturan tata air terutama pada lahan gambut belum optimal.
- Fungsi kelembagaan perubahan iklim daerah belum optimal.

7. *Penanganan Sampah yang belum optimal.*

Permasalahan yang mengakibatkan penanganan sampah belum optimal adalah :

- Belum optimalnya sinkronisasi pengelolaan sampah antara daerah yang berdekatan.
- Belum maksimalnya infrastruktur persampahan.
- Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
- Pengelolaan database persampahan yang belum terkoneksi.
- Terbatasnya kewenangan propinsi dalam pengelolaan sampah

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Melengkapi KAK/TOR setiap kegiatan sebagai dokumen pendukung kinerja yang ingin dicapai	Menyusun KAK menjadi panduan langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan terencana	https://drive.google.com/drive/folders/1clBDZNKgyWkpEbhygEdUEh3U_oYMpcb5?usp=sharing
2	Menyusun laporan kinerja secara berkala per triwulan (3 bulan) dan lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi rencana aksi kinerja agar diketahui progress capaian dan ditindaklanjuti	Laporan Kinerja telah disusun per triwulan sebagai bahan evaluasi dan monitoring	
3	Membuat berita acara hasil monitoring evaluasi kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan OPD	Laporan berita acara monitoring dan evaluasi telah dibuat sebagai bagian dari laporan monitoring triwulan	
4	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	SOP pengumpulan data telah disusun mulai tahun 2022 dan telah dilakukan penyesuaian	
5	Membuat berita acara hasil monev rencana aksi dan laporan capaian kinerja per triwulan dan ditandatangani oleh pimpinan OPD	Laporan berita acara monitoring dan evaluasi kinerja telah disusun dan ditandatangani pimpinan	

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
6	Lampirkan bukti atau keterangan yang menyatakan bahwa laporan kinerja OPD telah direviu	Laporan Kinerja telah direviu oleh Biro Organisasi	
7	Lakukan tindaklanjut atas seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023	Tindaklanjut evaluasi kinerja tahun 2023 telah dilakukan dengan melampirkan bukti rencana tindak lanjut tahun 2023	
8	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi digunakan untuk menganalisis kekurangan dalam capaian kinerja sehingga bisa ditarik satu Kesimpulan untuk merumuskan tindaklanjut yang lebih efektif dan efisien untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	
9	Manfaatkan teknologi informasi (aplikasi) Pengukuran Kinerja dan mengevaluasi kinerja internal Perangkat Daerah	Penginputan rencana dan evaluasi kinerja telah menggunakan aplikasi SALIARA	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan (*objectives*) merupakan penjabaran dari pernyataan misi, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan juga bisa diartikan sebagai penjabaran yang lebih spesifik, namun belum bisa diukur, dari *apa yang ingin sebenarnya dicapai dengan menjalankan misi* yang telah ditetapkan. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa apabila tujuan telah tercapai maka dengan sendirinya misi juga telah dicapai.

Tujuan utama (*main objectives*) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa tujuan khusus atau sub tujuan (*specific objectives*).

Tujuan :

1. Meningkatkan penataan dan penegakkan hukum lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan teduh.
3. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (kualitas air dan udara).

Untuk mencapai tujuan utama diatas, perlu dirumuskan sasaran. Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada sasaran

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	65,29	65,39	65,49	65,59	65,69
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	90,38	90,49	90,59	90,69	90,79
		Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	70,62	71,21	71,81	72,40	72,99
		Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	27	27,5	28	28,5	29

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan misi pembangunan daerah ke 3 yaitu: mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor, Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap tujuan 1 dari Misi 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Tujuan Daerah tersebut

diturunkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Menurunkan Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission.

Adapun sasaran renstra yang merupakan penjabaran dari tujuan penyusunan renstra DLH adalah :

1. Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati;
2. Meningkatnya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati;
3. Menurunnya Emisi GRK yang Terverifikasi dari sektor limbah.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Menurunkan Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Air	Indeks	81,16	81,36	81,56	81,76	81,96
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,61	80,91	81,21	81,51	81,81
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	79,97	80,02	80,07	80,12	80,17
		Meningkatnya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	Persen	14,29	21,43	28,57	35,71	42,86
		Menurunnya Emisi GRK yang Terverifikasi dari sektor limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	TonCO2 Eq	352,91	342,91	332,91	322,91	312,91

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Program prioritas daerah adalah serangkaian kegiatan atau inisiatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bersifat strategis, berbasis kebutuhan potensi daerah serta terintegrasi. Program prioritas pembangunan daerah selama periode 2025-2029 sebanyak 10 program. Program ini dipilih berdasarkan kebutuhan paling mendesak masyarakat serta disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada tabel 2.3 merupakan rincian 10 program prioritas beserta dengan sub kegiatan yang mendukung program prioritas.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Program Teknis Pencapaian Sasaran			
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	51.944.300,00	218.874.000,00	166.929.700
1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	180.000.000,00	180.000.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	-	180.000.000,00	180.000.000,00
1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	51.944.300,00	38.874.000,00	-13.070.300,00
	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	51.944.300,00	38.874.000,00	- 13.070.300,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	588.473.210,00	784.715.800,00	196.242.590
2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	414.402.500,00	605.540.800,00	191.138.300,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	210.074.000,00	210.074.000,00	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	97.329.500,00	97.329.350,00	- 150,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	106.999.000,00	298.137.450,00	191.138.450,00
2.1	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	45.734.710,00	7.310.000,00	- 38.424.710,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.734.710,00	7.310.000,00	- 38.424.710,00
2.1	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	128.336.000,00	171.865.000,00	43.529.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	43.120.000,00	79.240.000,00	36.120.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Restorasi	35.240.000,00	8.595.000,00	- 26.645.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	49.976.000,00	84.030.000,00	34.054.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	99.955.750,00	97.240.200,00	- 2.715.550,00
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	99.955.750,00	97.240.200,00	- 2.715.550,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	49.973.750,00	12.379.200,00	- 37.594.550,00
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	49.982.000,00	84.861.000,00	34.879.000,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	130.521.450,00	189.561.450,00	59.040.000,00
4.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130.521.450,00	189.561.450,00	59.040.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	130.521.450,00	189.561.450,00	59.040.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	484.860.750,00	422.565.850,00	- 62.294.900,00
5.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	484.860.750,00	422.565.850,00	- 62.294.900,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	197.285.000,00	66.540.900,00	- 130.744.100,00
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	287.575.750,00	356.024.950,00	68.449.200,00
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	70.062.750,00	35.044.850,00	- 35.017.900,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
6.1	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	70.062.750,00	35.044.850,00	- 35.017.900,00
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	70.062.750,00	35.044.850,00	- 35.017.900,00
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	217.296.150,00	185.082.450,00	- 32.213.700,00
7.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	217.296.150,00	185.082.450,00	- 32.213.700,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.069.950,00	46.878.900,00	- 55.191.050,00
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	45.226.100,00	41.060.000,00	- 4.166.100,00
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.000.250,00	21.113.300,00	- 8.886.950,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	39.999.850,00	76.030.250,00	36.030.400,00
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	218.426.100,00	131.199.265,00	- 87.226.835,00
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	218.426.100,00	131.199.265,00	- 87.226.835,00
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	218.426.100,00	131.199.265,00	- 87.226.835,00
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	49.818.300,00	30.460.000,00	- 19.358.300,00
9.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	49.818.300,00	30.460.000,00	- 19.358.300,00
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	49.818.300,00	30.460.000,00	- 19.358.300,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	430.505.700,00	195.535.049,00	-234.970.651,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
10.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	430.505.700,00	195.535.049,00	-234.970.651,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	249.250.000,00	18.935.000,00	-230.315.000,00
	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	41.969.700,00	92.180.049,00	50.210.349,00
	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	64.606.000,00	46.431.000,00	- 18.175.000,00
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	74.680.000,00	37.989.000,00	- 36.691.000,00
	Total Anggaran Teknis	2.341.864.460,00	2.290.278.914,00	- 51.585.546,00
	Program Penunjang Pencapaian Sasaran			
	<i>DINAS</i>			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.618.649.145,50	12.072.807.251,81	454.158.106,31
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.581.255,00	43.487.919,00	- 10.093.336,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.331.255,00	37.287.919,00	- 9.043.336,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.250.000,00	6.200.000,00	- 1.050.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.479.108.518,74	10.365.146.653,16	- 113.961.865,58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.418.063.488,74	9.245.712.219,16	-172.351.269,58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.041.700.000,00	1.101.725.000,00	60.025.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.345.030,00	17.709.434,00	- 1.635.596,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.925.000,00	10.750.962,99	1.825.962,99
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	8.925.000,00	10.750.962,99	1.825.962,99
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.650.000,00	16.775.000,00	- 25.875.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kepegawaian	31.700.000,00	7.150.000,00	- 24.550.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	10.950.000,00	9.625.000,00	- 1.325.000,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.801.915,76	630.910.885,26	147.108.969,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.435.579,00	5.247.103,00	- 1.188.476,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.930.553,00	94.293.309,76	- 52.637.243,24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.783,76	19.689.472,50	197.688,74
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.944.000,00	493.681.000,00	200.737.000,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	263.318.615,40	263.318.615,40
	Pengadaan Mebel	-	136.410.000,00	136.410.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	126.908.615,40	126.908.615,40
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.265.456,00	335.727.556,00	137.462.100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.590.456,00	298.717.056,00	120.126.600,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.675.000,00	37.010.500,00	17.335.500,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.317.000,00	406.689.660,00	54.372.660,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.827.000,00	326.619.660,00	44.792.660,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.490.000,00	80.070.000,00	9.580.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	<i>UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</i>			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	456.415.883,00	389.760.220,00	- 66.655.663,00
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.861.113,00	185.580.740,00	20.719.627,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.722.163,00	183.241.790,00	23.519.627,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.138.950,00	2.338.950,00	- 2.800.000,00
1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.154.770,00	-	- 90.154.770,00
	Pengadaan Mebel	18.254.170,00	-	- 18.254.170,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.900.600,00	-	- 71.900.600,00
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.680.000,00	92.880.000,00	1.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.680.000,00	92.880.000,00	1.200.000,00
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.720.000,00	111.299.480,00	1.579.480,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.500.000,00	61.129.980,00	- 34.370.020,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.220.000,00	50.169.500,00	35.949.500,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Total Anggaran Penunjang	12.075.065.028,50	12.462.567.471,81	387.502.443,31
	Total Anggaran Keseluruhan	14.416.929.488,50	14.752.846.385,81	335.916.897,31

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5.

Tabel 2.4 IKU Perangkat Daerah Renstra Tahun 2021-2026

N0	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\sqrt{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{ rata - rata} + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{ maksimum}}}{2}$ IP = Indeks Pencemaran Air Ci = konsentrasi parameter kualitas air i Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j	- Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari dana APBD	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup - Bidang Peningkatan Kapasitas, Sampah dan Limbah B3
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (IEU - 0,1)\right)$ $IEU = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ Indeks NO2 = $\frac{\text{Rata - Rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ Indeks SO2 = $\frac{\text{Rata - Rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$	- Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	$WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$ Dimana, Qi = sub indeks untuk parameter kualitas air ke i; Wi = bobot parameter kualitas air ke i; n = jumlah parameter kualitas air	- Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$E = DA \times FE$ E = Emisi GRK (Ton) DA = Data Aktivitas (Tj) FE = Faktor Emisi (Ton/Tj)	Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	- Bidang Peningkatan Kapasitas, Sampah dan Limbah B3 - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 2.5 IKU Perangkat Daerah Renstra Tahun 2025-2029

N0	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\sqrt{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{ rata - rata} + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{ maksimum}}}{2}$ IP = Indeks Pencemaran Air Ci = konsentrasi parameter kualitas air i Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j	- Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari dana APBD	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup - Bidang Peningkatan Kapasitas, Sampah dan Limbah B3
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (IEU - 0,1) \right)$ $IEU = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ Indeks NO₂ = $\frac{\text{Rata - Rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$ Indeks SO₂ = $\frac{\text{Rata - Rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$	- Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air Laut	$WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$ Dimana, Qi = sub indeks untuk parameter kualitas air ke i; Wi = bobot parameter kualitas air ke i; n = jumlah parameter kualitas air	- Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK	- Bidang Tata Lingkungan - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya Keanekaragaman Hayati Daerah	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	$\frac{(\sum \text{Taman Kehati yang dikelola dan dibina})}{(\sum \text{Target Taman Kehati Provinsi dan Kabupaten/Kota})} \times 100\%$	Laporan Inventarisasi dan monitoring Kehati	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3	Menurunnya Emisi GRK yang Terverifikasi pada Sektor Limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	Tingkat Emisi GRK = Data Aktivitas (DA) x Faktor Emisi (EF)	Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	- Bidang Peningkatan Kapasitas, Sampah dan Limbah B3 - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi pendukungnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran pada DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	65,59
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,10
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	79,18
4	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	28,5

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan Renstra tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Air	80,96
		Indeks Kualitas Udara	80,31
		Indeks Kualitas Air Laut	79,83
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	7,14
3	Menurunnya Emisi GRK Yang Terverifikasi Pada Sektor Limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	362,91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2025 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Capaian kinerja tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari hasil evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat pengelompokan kriteria penilaian realisasi kerja dari hasil pengumpulan data. Berikut kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dengan keterangan sebagai berikut:

a) Hasil sangat tinggi dan tinggi

Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b) Hasil sedang

Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c) Hasil rendah dan sangat rendah

Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dengan realisasi Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	65,69	82,73	125,94
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	93,10	87,69	94,19
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	79,18	85,24	107,65
4	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	28,5	12,15	42,63
Rata-rata Capaian						92,60

Kualitas air di Sulawesi Tengah baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks kualitas air sebesar 125,94%, yaitu dari target sebesar 65,69 poin dan terealisasi sebesar 82,73 poin. Titik pantau dilakukan di 4 sungai dan 1 danau yang merupakan danau prioritas nasional.

Kualitas udara di Sulawesi Tengah masih dalam kondisi cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks kualitas Udara sebesar 94,19% yaitu dari target sebesar 93,10 poin dan terealisasi sebesar 87,69 poin. Titik pantau dilakukan di 13 kabupaten/kota menggunakan metode passive sampler dengan parameter udara yang diuji adalah Parameter NO₂ dan Parameter SO₂.

Kualitas air Laut di Sulawesi Tengah baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks kualitas air laut sebesar 107,65%, yaitu dari target sebesar 79,18 poin dan terealisasi sebesar 85,24 poin. Titik pantau dilakukan di 2 titik yang terdiri dari 1 titik yang didanai dari anggaran APBN dan 1 titik hasil pemantauan dengan dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sulawesi Tengah belum baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Penurunan Emisi GRK 42,63 persen yaitu dari target sebesar 28,5 persen dan terealisasi sebesar 12,15 persen. Angka tersebut belum memenuhi target yang diamanatkan. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Provinsi Sulawesi Tengah masih butuh perbaikan di semua sektor emisi.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,39	63,63	97,31	65,49	61,63	94,10	65,69	82,73	125,94
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,49	91,88	101,54	91,90	93,09	101,28	93,10	87,69	94,19
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	71,21	79,81	112,08	79,91	79,08	98,96	79,18	85,24	107,65
4	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22	59,92	272,36	12,69	10,69	84,23	28,5	12,15	42,63

Dari segi realisasi, IKA Provinsi Sulawesi Tengah naik 21,1 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 61,63 poin dan tahun 2025 sebesar 82,73 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKA Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 31,84% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 94,10% dan pada tahun 2025 sebesar 125,94%.

Dari segi realisasi, IKU Provinsi Sulawesi Tengah menurun 5,41 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 93,09 poin dan tahun 2025 sebesar 87,69 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKA Provnsi Sulawesi Tengah menurun sebesar 7,09% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109% dan pada tahun 2025 sebesar 109,43%.

Dari segi realisasi, IKAL Provinsi Sulawesi Tengah naik 6,16 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 79,08 poin dan tahun 2025 sebesar 85,24 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKAL Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 8,69% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,96% dan pada tahun 2025 sebesar 107,65%.

Dari segi realisasi, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah naik 1,46 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 10,69 persen dan tahun 2025 sebesar 12,15 persen. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Penurunan Emisi Gas Rumah Provnsi Sulawesi Tengah menurun sebesar 41,60% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84,23% dan pada tahun 2025 sebesar 42,63%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan antara Target Jangka Menengah dengan realisasi Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)	82,73	65,69	125,94

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,69	90,79	96,58
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85,24	72,99	116,78
4	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,15	29	41,89

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IKA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 125,94% dari target Renstra sebesar 65,69 poin dan terealisasi 82,73 poin pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IKU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah mendekati target akhir Renstra yaitu sebesar 96,58% dari target Renstra sebesar 90,79 poin dan terealisasi 87,69 poin pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IKAL Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 116,78% dari target Renstra sebesar 72,99 poin dan terealisasi 85,24 poin pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 masih belum mencapai target akhir Renstra yaitu sebesar 41,89% dari target Renstra sebesar 29 Persen dan terealisasi 12,15 persen pada tahun 2025.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional atau daerah lain.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target/Standar Nasional	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)	82,73	72,02	114,87
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,69	78,53	111,66
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85,24	81,02	105,20
4	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,15	30	40,50

Pada tingkat nasional, IKA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berada di bawah rata rata nasional dengan selisih 10,71 poin dari rata rata nasional sebesar 72,02 poin dan realisasi IKA Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 82,73 poin.

Pada tingkat nasional, IKAL Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berada di atas rata rata nasional dengan selisih 6,19 poin dari rata rata nasional sebesar 78,84 poin dan realisasi IKAL Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 85,03 poin.

Pada tingkat nasional, IKU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berada di bawah rata rata nasional dengan selisih 7,28 poin dari rata rata nasional sebesar 88,67 poin dan realisasi IKU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 81,39 poin.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut

Ketercapaian Target Kinerja Tren perbaikan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut didorong oleh : Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan ditandai dengan Ketercapaian Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang dinilai dan diawasi Implementasinya yang mencapai target yaitu 100 persen. Penilaian Dokumen Lingkungan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan 33 Persetujuan Lingkungan yang terdiri dari: 13 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH); 15 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH); 4 Persetujuan DELH dan, 1 Persetujuan DPLH.

Terkendalanya pencemaran air sungai yang salah satu nya ditandai dengan Ketercapaian Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L). Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan persentase penurunan konsentrasi parameter COD menggunakan data terverifikasi pada web IKLH, yaitu data hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh KLHK, DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan DLH Kab/Kota. Didapat rata-rata konsentrasi parameter COD tahun 2025 sebesar 3,00 mg/L. Akhir Renstra konsentrasi parameter COD (mg/L) sesuai baku mutu yaitu 3 mg/L, dengan baseline data nilai COD tahun 2018 sebesar 30,42 mg/L, sehingga penurunan sampai akhir sebesar 27 mg/L. Penurunan nilai COD ini salah satu nya didorong oleh Meningkatnya industri yang melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui program PROPER yaitu program penghargaan kinerja lingkungan hidup badan usaha. Pada tahun 2025 ini 37 perusahaan telah mengikuti PROPER.

Meningkatnya Kapabilitas Laboratorium Lingkungan yang ditandai dengan Persentase Permohonan Pengujian Sampel yang tertangani yang diperoleh dengan nilai 100 % dari target 100 %. Nilai 100% ini diperoleh dari 1164 permohonan pengujian/sampel uji yang semua terlayani dan tertangani. Terjadi peningkatan pengujian tahun 2025 yaitu 1164 sampel uji dibandingkan tahun 2024 yaitu 797 sampel uji. Saat ini pengujian yang terakreditasi adalah 25 parameter : 7 parameter air limbah, 9 parameter Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi dan 9 parameter air

sungai. Sedangkan parameter yang biasa dilakukan pengujian sebagai berikut : pH, Suhu, TDS, TSS, DO, COD, BOD, Kekeruhan, Bau, Sulfat Klorida, Besi, Nitrat, Nitrit, Total Fosfat, Surfaktan, Amonia, Total Coli, E. Coli, Fecal Coliform.

Berkurangnya Kasus Pelanggaran, Sengketa dan Pidana Lingkungan ditandai dengan Persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha dan/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan nilai 100% dari target 100%. Nilai ini diperoleh pengawasan insidental yang masuk melalui aplikasi surat atau pun pelimpahan pusat atau kabupaten/kota, dan media elektronik. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap Hukum lingkungan yang ditandai dengan Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai 4,16% yang diperoleh dari Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan sebanyak 65 perusahaan (28 perusahaan pengawasan rutin dan 37 pembinaan PROPER) dengan 62 penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang belum taat terhadap semua ketentuan yang harus dipenuhi. Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang ditandainya Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan nilai 100 persen dari target 100 persen. Nilai 100 persen ini diperoleh dari Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dihasilkan dan divalidasi sebanyak 2 dokumen.

Meningkatnya kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan Persentase Persentase Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan nilai 91,66% dari target 20%. Nilai tersebut diperoleh dari kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang telah terlaksana, dengan berbagai indikator seperti Kampanye Peringatan Hari Lingkungan, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup (Bank Sampah dan Edukasi Pengolahan Sampah), Jumlah kegiatan pengembangan generasi lingkungan (sesuai target

sebesar 1 kegiatan), Komponen Kabupaten/Kota yang dibina (Kalpataru) realisasi 1 Kabupaten/Kota dari 1 Kabupaten/Kota yang ditargetkan, Kabupaten/Kota yang dibina (Adipura), Sekolah yang Dibina Sekolah Adiwiyata Provinsi (realisasi 10 sekolah dari 10 sekolah yang ditargetkan), Sekolah yang Dibina Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri dari target 7 sekolah dengan realisasi sebesar 7 sekolah.

Terkendalinya Pencemaran B3 dan LB3 yang ditandai dengan Persentase limbah B3 yang dikelola dengan nilai 74,65% dari target 50%. Nilai tersebut diperoleh dari seluruh kabupaten/kota atau 13 kabupaten/kota telah melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3. Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup yang ditandai dengan Persentase status pembinaan perlindungan dan pelestarian lingkungan masyarakat hukum adat di kabupaten/kota dengan nilai 28,57% dari target 20% dari 2 MHA. Nilai tersebut diperoleh dari pembinaan yang dilakukan di 2 MHA.

Ketercapaian Target Kinerja Tren perbaikan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut didorong oleh program dan upaya yang dilakukan oleh multi stakeholder sesuai dengan kewenangan dan perannya masing. Manajemen DAS Prioritas seperti Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Kerusakan Sungai (Satgas PPK DAS) Palu-Poso mampu mengakselerasi pencapaian perbaikan Kualitas Air Sungai secara umum. Hal ini juga didukung oleh program-program yang berdampak langsung seperti penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, dan penanganan persampahan. Dan juga didukung oleh program-program berdampak tidak langsung seperti pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan hukum, edukasi, pemberdayaan masyarakat, riset, pengembangan dan pengelolaan data informasi kehumasan.

Dengan berbagai upaya program dan penanganan yang telah dilaksanakan secara garis besar indeks kualitas air dan air laut mengalami tren perbaikan serta secara umum kualitas air sungai di Provinsi Sulawesi Tengah masih menunjukkan status memenuhi baku mutu. Sumber permasalahan yang terjadi didominasi oleh rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah sekitar terhadap kelestarian alam. Beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi kawasan permukiman, pertanian, peternakan, dan industri.
2. Bertambahnya jumlah luasan lahan kritis akibat perencanaan dan pengawasan yang kurang baik.
3. Pencemaran terhadap sungai oleh limbah domestik, yaitu air limbah yang berasal dari permukiman, pertanian, peternakan, dan industri.
4. Tingkat pengambilan air tanah di luar kendali (tereksploitasi secara berlebihan) menyebabkan penurunan muka tanah dan memperbesar potensi daerah rawan banjir.

Permasalahan yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan sering menjadikan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek, atau bahkan tidak mendukung masyarakat sama sekali dan lebih mementingkan kepentingan bisnis semata.

Faktor keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Sulawesi Tengah didukung oleh Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap Hukum lingkungan yang ditandai dengan Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 100%. Ketaatan pelaku tidak terlepas dari meningkatnya kualitas pengawasan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha yang dapat diukur dengan Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen perizinan sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terlatihnya PPLH tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 1 orang, Tersusunnya Kajian Akademik terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen, dan Terawasinya pelaku usaha industri terhadap Persetujuan Lingkungan sebanyak 28 industri.

Selain itu, keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Sulawesi Tengah didukung juga oleh Terkendalinya pencemaran air sungai ditandai dengan Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L). Terkendalinya indeks kualitas air tidak terlepas dari meningkatnya industri yang melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup ditandai dengan Persentase ketaatan industri dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terbinanya Laboratorium kab/kota sebanyak 13 Kab/Kota dan Terbinanya pelaku usaha industri terkait pengelolaan pencemaran lingkungan sebanyak 58 Industri.

Faktor keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di Sulawesi Tengah didukung oleh Terkendalnya pencemaran air laut ditandai dengan Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L). Terkendalnya pencemaran air laut tidak terlepas dari Meningkatnya Kualitas Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Laut ditandai dengan Persentase Data Kualitas Air Laut sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terpantaunya kualitas air laut di 2 Kab/Kota dengan 3 kategori lokasi : Pelabuhan, Wisata Bahari, dan Biota Laut.

Indeks Kualitas Udara

Faktor keberhasilan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) di Sulawesi Tengah didukung oleh Terkendalnya Pencemaran Udara ditandai dengan Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX. Terkendalnya pencemaran udara tidak terlepas dari Meningkatnya Kualitas data hasil pemantauan kualitas udara ditandai dengan Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan passive sampler sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terpantaunya kualitas udara di 13 Kab/Kota dengan 4 kategori lokasi yaitu : Transportasi, Perkantoran, Pemukiman dan Industri.

Ketercapaian Target Kinerja Tren perbaikan Indeks Kualitas udara didorong oleh Meningkatnya kelestarian keanekaragaman hayati (persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang ditandai dengan meningkatnya Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang mencapai 100%. Nilai tersebut diperoleh dari total jumlah taman kehati yang telah ada dan sudah dikelola dibagi jumlah target 1 taman kehati pada tahun 2025. Terkendalnya Pencemaran Udara yang ditandai oleh Persentase penurunan konsentrasi parameter SO. Nilai tersebut diperoleh dari Data yang digunakan untuk perhitungan persentase penurunan konsentrasi parameter SO_x menggunakan data terverifikasi pada web IKLH, yaitu data hasil pemantauan kualitas udara yang

dilakukan oleh KLHK, DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan DLH Kab/Kota. Penurunan nilai SOX ini salah satunya didorong oleh Meningkatnya industri yang melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui program PROPER yaitu program penghargaan kinerja lingkungan hidup badan usaha. Pada tahun 2025 ini 37 perusahaan telah mengikuti PROPER.

Ketercapaian target kinerja perbaikan Indeks Kualitas Udara didorong oleh program dan ditunjang oleh peralatan-peralatan yang dikhususkan untuk mengukur Indeks Kualitas Udara serta sumber daya manusia yang dapat mengelola alat tersebut. Maka dari itu diperlukannya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi para Sumber Daya Manusia yang ada. Masih perlu ditingkatkan nya peran serta para multi stakeholder dalam menangani pengendalian udara yang dimana hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Upaya dan program-program yang telah dilaksanakan melalui pemantauan Rutin Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler di 13 Kab/Kota pada Musim Hujan & Musim Kemarau, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PROPER) Per 2025 khususnya aspek pengendalian pencemaran udara diikuti oleh 37 Pelaku Usaha se Sulawesi Tengah, Uji Emisi Kendaraan Bermotor melibatkan Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara untuk Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Secara agregat baik itu agregat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah ataupun agregasi berdasarkan periodisasi pemantauan kualitas udara ambien yang direpresentasikan oleh Indeks Kualitas Udara menunjukkan tren perbaikan. Namun pada saat-saat tertentu yang dipengaruhi oleh aspek klimatologis seperti elnino dan musim kemarau ekstrim, kualitas udara mengalami penurunan insidental khususnya di wilayah perkotaan.

Mengatasi polusi udara membutuhkan pendekatan multi-faceted. Menerapkan sumber energi bersih, mempromosikan transportasi berkelanjutan, dan mengadopsi teknologi hijau adalah langkah penting. Selain itu, meningkatkan pemantauan kualitas udara dan menegakkan peraturan emisi yang lebih ketat dapat memberikan dampak

yang signifikan. Individu dapat berkontribusi dengan mengurangi jejak karbon pribadi, mendukung kebijakan lingkungan, dan menyebarkan kesadaran.

Tingkat Upaya Penurunan Gas Rumah Kaca

Faktor keberhasilan capaian Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca limbah domestik didukung oleh Terkendalnya dampak Perubahan Iklim ditandai dengan Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota sebesar 100%. Terkendalnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca limbah domestik tidak terlepas dari Meningkatnya kualitas Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK di Sulawesi Tengah ditandai dengan Persentase data Inventarisasi dan Mitigasi GRK di Sulawesi Tengah yang valid sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terinventarisasi GRK di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13 Kab/Kota. Selain itu, faktor keberhasilan capaian Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca limbah domestik didukung juga oleh Terkendalnya dampak Perubahan Iklim ditandai dengan Persentase Peningkatan Kampung Iklim sebesar 100%. hal ini tidak terlepas dari Meningkatnya Kualitas pembinaan Kampung Iklim ditandai dengan Persentase Peningkatan Kampung Iklim yang dibina di Sulawesi Tengah sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terbinanya lokasi kampung iklim sebanyak 40 lokasi dan diterapkannya pilot project teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada kampung iklim.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik antara lain mitigasi perubahan iklim sektor limbah yang dilakukan berupa Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan TPS Terpadu 3R/Komposting, dan Pendirian dan Operasional Bank Sampah. Ketercapaian Target Kinerja tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik didorong oleh: Terkendalnya dampak Perubahan Iklim yang ditandai dengan Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota dengan nilai 100% dari target 100%. Nilai ini diperoleh 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dari target 13 Kabupaten Kota yang telah melaporkan data inventarisasi GRK pada website SIGN-SMART dan/atau memberikan laporan inventarisasi GRK secara langsung ke DLH Provinsi Sulawesi Tengah.

Terkendalinya Perubahan iklim juga ditandai dengan Persentase Peningkatan Kampung Iklim dengan nilai 100% dari target 100%. Nilai tersebut diperoleh dari peningkatan jumlah total lokasi ProKlim sampai dengan tahun 2025 yaitu sebanyak 296 lokasi ProKlim.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Analisis Efisiensi Anggaran Per Target Sasaran IKU

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,69	82,73	125,94	1.746.139.178	1.530.619.490	87,66
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				125,94	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		87,66
Tingkat Efisiensi = 38,28 (efisiensi tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Indeks Kualitas Air mencapai 125,94 Persen dan realisasi anggaran Rp. 1.530.619.490 atau mencapai 87,66 Persen maka efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 38,28.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,1	87,69	94,19	97.240.200	95.078.540	97,78
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				94,19	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		97,78
Tingkat Efisiensi = -3,59 (efisiensi tidak tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Indeks Kualitas Udara mencapai 94,19 Persen dan realisasi anggaran Rp. 95.078.540 atau mencapai 97,78 Persen maka tingkat efisiensi sebesar -3,59 sehingga efisiensi tidak tercapai.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	79,18	85,24	107,65	398.906.750	388.466.429	97,80
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				107,65	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		97,80
Tingkat Efisiensi = 9,85 (efisiensi tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Indeks Kualitas Air Laut mencapai 107,65 Persen dan realisasi anggaran Rp. 238.619.581 atau mencapai 97,80 Persen maka efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 9,85.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	28,5	12,15	42,63	195.535.049	145.175.698	74,25
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				42,63	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		74,25
Tingkat Efisiensi = -31,62 (efisiensi tidak tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mencapai 42,63 Persen dan realisasi anggaran Rp. 145.175.698 atau mencapai 74,25 Persen maka tingkat efisiensi sebesar -36,74 sehingga efisiensi anggaran atas kinerja tidak tercapai.

3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.6 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan	Indeks Kualitas Air	Poin	65,69	82,73	125,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,10	87,69	94,19
		Indeks Kualitas Air Laut	Poin	79,18	85,24	107,65
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	Persen	7,14	7,14	100
3	Menurunnya Emisi GRK Yang Terverifikasi Pada Sektor Limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	TonCO2Eq	362,91	385	94,26

Kualitas air di Sulawesi Tengah baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks kualitas air sebesar 125,94%, yaitu dari target sebesar 65,69 poin dan terealisasi sebesar 82,73 poin. Titik pantau dilakukan di 4 sungai dan 1 danau yang merupakan danau prioritas nasional.

Kualitas udara di Sulawesi Tengah masih dalam kondisi cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks kualitas Udara sebesar 94,19% yaitu dari target sebesar 93,10 poin dan terealisasi sebesar 87,69 poin. Titik pantau dilakukan di 13 kabupaten/kota menggunakan metode passive sampler dengan parameter udara yang diuji adalah Parameter NO₂ dan Parameter SO₂.

Kualitas air Laut di Sulawesi Tengah baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks kualitas air laut sebesar 107,65%, yaitu dari target sebesar 79,18 poin dan terealisasi sebesar 85,24 poin. Titik pantau dilakukan di 2 titik yang terdiri dari 1 titik yang didanai dari anggaran APBN dan 1 titik hasil pemantauan dengan dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Persentase taman kehati yang dikelola/dibina baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100 persen yaitu dari target sebesar 7,14 persen dan terealisasi sebesar 7,14 persen. Pembinaan Taman Kehati terealisasi 1 taman kehati kabupaten.

Emisi GRK sektor limbah di Sulawesi Tengah baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Emisi GRK sektor limbah 94,26 persen yaitu dari target sebesar 362,91 TonCO₂Eq dan terealisasi sebesar 385 TonCO₂Eq. Angka tersebut telah memenuhi target yang diamanatkan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Nilai perbandingan realisasi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,39	63,63	97,31	65,49	61,63	94,10	65,69	82,73	125,94
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,49	91,88	101,54	91,90	93,09	101,28	93,10	87,69	94,19
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	71,21	79,81	112,08	79,91	79,08	98,96	79,18	85,24	107,65
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	-	-	-	-	-	-	7,14	7,14	100
3	Menurunnya Emisi GRK Yang Terverifikasi Pada Sektor Limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	--	--	--	--	--	--	352,91	385	94,26

Dari segi realisasi, IKA Provinsi Sulawesi Tengah naik 21,1 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 61,63 poin dan tahun 2025 sebesar 82,73 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKA Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 31,84% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 94,10% dan pada tahun 2025 sebesar 125,94%.

Dari segi realisasi, IKU Provinsi Sulawesi Tengah menurun 5,41 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 93,09 poin dan tahun 2025 sebesar 87,69 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKA Provinsi Sulawesi Tengah menurun sebesar 7,09% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109% dan pada tahun 2025 sebesar 109,43%.

Dari segi realisasi, IKAL Provinsi Sulawesi Tengah naik 6,16 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 79,08 poin dan tahun 2025 sebesar 85,24 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKAL Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 8,69% dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,96% dan pada tahun 2025 sebesar 107,65%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Perbandingan antara Target Jangka Menengah dengan realisasi Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2030	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap	Indeks Kualitas Air (IKA)	82,73	81,96	100,94
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,69	81,81	107,19
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85,24	80,12	106,39

	Keanekaragaman Hayati				
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	7,14	35,71	19,99
3	Menurunnya Emisi GRK Yang Terverifikasi Pada Sektor Limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	385	312,91	81,28

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IKA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 125,94% dari target Renstra sebesar 65,69 poin dan terealisasi 82,73 poin pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IKU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah mendekati target akhir Renstra yaitu sebesar 96,58% dari target Renstra sebesar 90,79 poin dan terealisasi 87,69 poin pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian IKAL Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 116,78% dari target Renstra sebesar 72,99 poin dan terealisasi 85,24 poin pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Taman Kehati yang dikelola dan dibina tahun 2025 belum mencapai target akhir Renstra yaitu sebesar 19,99% dari target Renstra sebesar 35,71 persen dan terealisasi 7,14 persen pada tahun 2025.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Emisi GRK sektor limbah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sudah mendekati target akhir Renstra yaitu sebesar 81,28% dari target Renstra sebesar 312,91 TonCO₂Eq dan terealisasi 385 TonCO₂Eq pada tahun 2025.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target/Standar Nasional	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengurangan Risiko dan Dampak Negatif Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Air (IKA)	82,73	72,02	114,87
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,69	78,53	111,66
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85,24	81,02	105,21
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina	7,14	--	--
3	Menurunnya Emisi GRK Yang Terverifikasi Pada Sektor Limbah	Emisi GRK Sektor Limbah	385	620	62,10

Pada tingkat nasional, IKA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berada di bawah rata rata nasional dengan selisih 10,71 poin dari rata rata nasional sebesar 72,02 poin dan realisasi IKA Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 82,73 poin.

Pada tingkat nasional, IKAL Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berada di atas rata rata nasional dengan selisih 4,22 poin dari rata rata nasional sebesar 81,02 poin dan realisasi IKAL Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 85,24 poin.

Pada tingkat nasional, IKU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berada di atas rata rata nasional dengan selisih 9,16 poin dari rata rata nasional sebesar 78,53 poin dan realisasi IKU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 87,69 poin.

Pada tingkat nasional, Emisi GRK Sektor Limbah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 masih berada di bawah rata rata nasional dengan selisih 235 TonCO₂Eq dari rata rata nasional sebesar 620 TonCO₂Eq dan realisasi IKU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 385 TonCO₂Eq.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut

Ketercapaian Target Kinerja Tren perbaikan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut didorong oleh : Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan ditandai dengan Ketercapaian Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang dinilai dan diawasi Implementasinya yang mencapai target yaitu 100 persen. Penilaian Dokumen Lingkungan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan 33 Persetujuan Lingkungan yang terdiri dari: 13 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH); 15 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH); 4 Persetujuan DELH dan, 1 Persetujuan DPLH.

Terkendalanya pencemaran air sungai yang salah satu nya ditandai dengan Ketercapaian Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L). Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan persentase penurunan konsentrasi parameter COD menggunakan data terverifikasi pada web IKLH, yaitu data hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh KLHK, DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan DLH Kab/Kota. Didapat rata-rata konsentrasi parameter COD tahun 2025 sebesar 3,00 mg/L. Akhir Renstra konsentrasi parameter COD (mg/L) sesuai baku mutu yaitu 3 mg/L, dengan baseline data nilai COD tahun 2018 sebesar 30,42 mg/L, sehingga penurunan sampai akhir sebesar 27 mg/L. Penurunan nilai COD ini salah satu nya didorong oleh Meningkatnya industri yang melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui program PROPER yaitu program penghargaan kinerja lingkungan hidup badan usaha. Pada tahun 2025 ini 37 perusahaan telah mengikuti PROPER.

Meningkatnya Kapabilitas Laboratorium Lingkungan yang ditandai dengan Persentase Permohonan Pengujian Sampel yang tertangani yang diperoleh dengan nilai 100 % dari target 100 %. Nilai 100% ini diperoleh dari 1164 permohonan pengujian/sampel uji yang semua terlayani dan tertangani. Terjadi peningkatan

pengujian tahun 2025 yaitu 1164 sampel uji dibandingkan tahun 2024 yaitu 797 sampel uji. Saat ini pengujian yang terakreditasi adalah 25 parameter : 7 parameter air limbah, 9 parameter Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi dan 9 parameter air sungai. Sedangkan parameter yang biasa dilakukan pengujian sebagai berikut : pH, Suhu, TDS, TSS, DO, COD, BOD, Kekerusuhan, Bau, Sulfat Klorida, Besi, Nitrat, Nitrit, Total Fosfat, Surfaktan, Amonia, Total Coli, E. Coli, Fecal Coliform.

Berkurangnya Kasus Pelanggaran, Sengketa dan Pidana Lingkungan ditandai dengan Persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha dan/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan nilai 100% dari target 100%. Nilai ini diperoleh pengawasan insidental yang masuk melalui aplikasi surat atau pun pelimpahan pusat atau kabupaten/kota, dan media elektronik. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap Hukum lingkungan yang ditandai dengan Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai 4,16% yang diperoleh dari Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan sebanyak 65 perusahaan (28 perusahaan pengawasan rutin dan 37 pembinaan PROPER) dengan 62 penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang belum taat terhadap semua ketentuan yang harus dipenuhi. Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang ditandainya Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan nilai 100 persen dari target 100 persen. Nilai 100 persen ini diperoleh dari Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dihasilkan dan divalidasi sebanyak 2 dokumen.

Meningkatnya kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan Persentase Persentase Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan nilai 91,66% dari target 20%. Nilai tersebut diperoleh dari kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang telah terlaksana, dengan berbagai indikator

seperti Kampanye Peringatan Hari Lingkungan, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup (Bank Sampah dan Edukasi Pengolahan Sampah), Jumlah kegiatan pengembangan generasi lingkungan (sesuai target sebesar 1 kegiatan), Komponen Kabupaten/Kota yang dibina (Kalpataru) realisasi 1 Kabupaten/Kota dari 1 Kabupaten/Kota yang ditargetkan, Kabupaten/Kota yang dibina (Adipura), Sekolah yang Dibina Sekolah Adiwiyata Provinsi (realisasi 10 sekolah dari 10 sekolah yang ditargetkan), Sekolah yang Dibina Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri dari target 7 sekolah dengan realisasi sebesar 7 sekolah.

Terkendalnya Pencemaran B3 dan LB3 yang ditandai dengan Persentase limbah B3 yang dikelola dengan nilai 74,65% dari target 50%. Nilai tersebut diperoleh dari seluruh kabupaten/kota atau 13 kabupaten/kota telah melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3. Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup yang ditandai dengan Persentase status pembinaan perlindungan dan pelestarian lingkungan masyarakat hukum adat di kabupaten/kota dengan nilai 28,57% dari target 20% dari 2 MHA. Nilai tersebut diperoleh dari pembinaan yang dilakukan di 2 MHA.

Ketercapaian Target Kinerja Tren perbaikan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut didorong oleh program dan upaya yang dilakukan oleh multi stakeholder sesuai dengan kewenangan dan perannya masing. Manajemen DAS Prioritas seperti Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Kerusakan Sungai (Satgas PPK DAS) Palu-Poso mampu mengakselerasi pencapaian perbaikan Kualitas Air Sungai secara umum. Hal ini juga didukung oleh program-program yang berdampak langsung seperti penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, dan penanganan persampahan. Dan juga didukung oleh program-program berdampak tidak langsung seperti pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan hukum, edukasi, pemberdayaan masyarakat, riset, pengembangan dan pengelolaan data informasi kehumasan.

Dengan berbagai upaya program dan penanganan yang telah dilaksanakan secara garis besar indeks kualitas air dan air laut mengalami tren perbaikan serta secara umum kualitas air sungai di Provinsi Sulawesi Tengah masih menunjukkan

status memenuhi baku mutu. Sumber permasalahan yang terjadi didominasi oleh rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah sekitar terhadap kelestarian alam.

Beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

5. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi kawasan permukiman, pertanian, peternakan, dan industri.
6. Bertambahnya jumlah luasan lahan kritis akibat perencanaan dan pengawasan yang kurang baik.
7. Pencemaran terhadap sungai oleh limbah domestik, yaitu air limbah yang berasal dari permukiman, pertanian, peternakan, dan industri.
8. Tingkat pengambilan air tanah di luar kendali (tereksploitasi secara berlebihan) menyebabkan penurunan muka tanah dan memperbesar potensi daerah rawan banjir.

Permasalahan yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan sering menjadikan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek, atau bahkan tidak mendukung masyarakat sama sekali dan lebih mementingkan kepentingan bisnis semata.

Faktor keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Sulawesi Tengah didukung oleh Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap Hukum lingkungan yang ditandai dengan Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 100%. Ketaatan pelaku tidak terlepas dari meningkatnya kualitas pengawasan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha yang dapat diukur dengan Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen perizinan sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terlatihnya PPLH tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 1 orang, Tersusunnya Kajian Akademik terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen, dan Terawasinya pelaku usaha industri terhadap Persetujuan Lingkungan sebanyak 28 industri.

Selain itu, keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Sulawesi Tengah didukung juga oleh Terkendalinya pencemaran air sungai ditandai dengan

Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L). Terkendalnya indeks kualitas air tidak terlepas dari meningkatnya industri yang melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup ditandai dengan Persentase ketaatan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terbinanya Laboratorium kab/kota sebanyak 13 Kab/Kota dan Terbinanya pelaku usaha industri terkait pengelolaan pencemaran lingkungan sebanyak 58 Industri.

Faktor keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di Sulawesi Tengah didukung oleh Terkendalnya pencemaran air laut ditandai dengan Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L). Terkendalnya pencemaran air laut tidak terlepas dari Meningkatnya Kualitas Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Laut ditandai dengan Persentase Data Kualitas Air Laut sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terpantaunya kualitas air laut di 2 Kab/Kota dengan 3 kategori lokasi : Pelabuhan, Wisata Bahari, dan Biota Laut.

Indeks Kualitas Udara

Faktor keberhasilan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) di Sulawesi Tengah didukung oleh Terkendalnya Pencemaran Udara ditandai dengan Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX. Terkendalnya pencemaran udara tidak terlepas dari Meningkatnya Kualitas data hasil pemantauan kualitas udara ditandai dengan Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan passive sampler sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan yaitu Terpantaunya kualitas udara di 13 Kab/Kota dengan 4 kategori lokasi yaitu : Transportasi, Perkantoran, Pemukiman dan Industri.

Ketercapaian Target Kinerja Tren perbaikan Indeks Kualitas udara didorong oleh Meningkatnya kelestarian keanekaragaman hayati (persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang ditandai dengan meningkatnya Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang mencapai 100%. Nilai tersebut diperoleh dari total jumlah taman kehati yang telah ada dan sudah dikelola dibagi jumlah target 1 taman kehati pada tahun 2025. Terkendalnya Pencemaran Udara yang ditandai oleh Persentase penurunan

konsentrasi parameter SO. Nilai tersebut diperoleh dari Data yang digunakan untuk perhitungan persentase penurunan konsentrasi parameter SO_x menggunakan data terverifikasi pada web IKLH, yaitu data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh KLHK, DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan DLH Kab/Kota. Penurunan nilai SO_x ini salah satunya didorong oleh Meningkatnya industri yang melakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui program PROPER yaitu program penghargaan kinerja lingkungan hidup badan usaha. Pada tahun 2025 ini 37 perusahaan telah mengikuti PROPER.

Ketercapaian target kinerja perbaikan Indeks Kualitas Udara didorong oleh program dan ditunjang oleh peralatan-peralatan yang dikhususkan untuk mengukur Indeks Kualitas Udara serta sumber daya manusia yang dapat mengelola alat tersebut. Maka dari itu diperlukannya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi para Sumber Daya Manusia yang ada. Masih perlu ditingkatkan nya peran serta para multi stakeholder dalam menangani pengendalian udara yang dimana hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Upaya dan program-program yang telah dilaksanakan melalui pemantauan Rutin Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler di 13 Kab/Kota pada Musim Hujan & Musim Kemarau, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PROPER) Per 2025 khususnya aspek pengendalian pencemaran udara diikuti oleh 37 Pelaku Usaha se Sulawesi Tengah, Uji Emisi Kendaraan Bermotor melibatkan Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara untuk Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Secara agregat baik itu agregat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah ataupun agregasi berdasarkan periodisasi pemantauan kualitas udara ambien yang direpresentasikan oleh Indeks Kualitas Udara menunjukkan tren perbaikan. Namun pada saat-saat tertentu yang dipengaruhi oleh aspek klimatologis seperti elnino dan musim kemarau ekstrim, kualitas udara mengalami penurunan insidental khususnya di wilayah perkotaan.

Mengatasi polusi udara membutuhkan pendekatan multi-faceted. Menerapkan sumber energi bersih, mempromosikan transportasi berkelanjutan, dan mengadopsi

teknologi hijau adalah langkah penting. Selain itu, meningkatkan pemantauan kualitas udara dan menegakkan peraturan emisi yang lebih ketat dapat memberikan dampak yang signifikan. Individu dapat berkontribusi dengan mengurangi jejak karbon pribadi, mendukung kebijakan lingkungan, dan menyebarkan kesadaran.

Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina

Capaian IKU ini telah mencapai 100 persen. Pada tahun ini Dinas Lingkungan Hidup menargetkan untuk melakukan pembinaan terhadap satu taman kehati di kabupaten/kota. Taman kehati yang menjadi target pembinaan adalah Taman Kehati di Kabupaten Banggai Kepulauan. Taman Keanekaragaman Hayati Kokolomboi terletak di Dusun Kokolomboi Desa Leme-leme Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Luas areal pengembangan Taman Kehati Kokolomboi adalah 10 Ha. Topografi kawasan perbukitan berada pada ketinggian 600- 1000 mdpl. Status lahan Taman Kehati ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Emisi GRK Sektor Limbah

Emisi GRK dari sektor limbah mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Penurunan ini terlihat pada limbah padat dari 52 GgCO₂eq tahun 2021 menjadi 36 GgCO₂eq tahun 2024. Limbah cair domestik juga mengalami penurunan tetapi fluktuatif, dimana tahun 2020 sebesar 365 GgCO₂eq turun menjadi 308 GgCO₂eq di tahun 2024. Untuk limbah cair industri menunjukkan nilai yang tinggi sedangkan tahun setelahnya tidak menghasilkan emisi dikarenakan sampai saat ini data belum tersedia (Not Estimated). Jumlah emisi GRK dalam sektor limbah mencakup CH₄(metana), N₂O (dinitro oksida) dan CO₂ (karbondioksida) apabila terjadi pada kondisi anaerobik. CH₄ dapat berasal dari proses penguraian anaerobik limbah padat dan limbah cair. Komposisi sampah dan metode pembuangan sampah sangat berpengaruh terhadap besaran emisi CH₄ karena terkait dengan udara luar yaitu oksigen. Pembakaran sampah merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempunyai peranan besar dalam pencemaran udara. Dalam

proses pembakaran sempurna (tinggi) emisi yang dihasilkan adalah emisi CO₂ sedangkan dalam pembakaran tidak sempurna emisi yang dihasilkan berupa CO₂, CH₄, dan N₂O. Emisi pencemaran udara oleh pembakaran sampah adalah emisi partikulat sedangkan emisi dari proses dekomposisi yang perlu diperhatikan adalah emisi HC dalam bentuk gas metana. Pengomposan merupakan proses aerobik yang mana salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Namun pengelolaan sampah organik dengan cara pembusukan akan menyebabkan pelepasan gas metana ke atmosfer sehingga perlu adanya inovasi terbaru dalam pengelolaan sampah organik sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya penurunan emisi GRK sektor limbah ini didukung oleh capaian pengelolaan sampah yang diukur melalui indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah 37,03 poin dari target 38,20 poin atau mencapai 96,94%. Upaya yang dilakukan mendukung pencapaian IKPS antara lain : Kampanye Hentikan Polusi Sampah dengan kegiatan bersih sampah di kawasan sekolah, pasar, tempat wisata dan pantai pada Hari Peduli Sampah Nasional; Lomba kebersihan tingkat OPD untuk meningkatkan kepedulian ASN akan pentingnya lingkungan yang bersih; pengadaan tong sampah 4 warna untuk edukasi pemilahan sampah; pengadaan kantong plastik sampah; evaluasi capaian Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Pengelolaan Sampah; Pemantauan Pengelolaan Sampah di 7 Kabupaten/Kota serta Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan TPA Open Dumping di 5 Kabupaten/Kota.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Analisis Efisiensi Anggaran Per Target Sasaran IKU

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,69	82,73	125,94	1.746.139.178	1.530.619.490	87,66
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				125,94	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		87,66
Tingkat Efisiensi = 38,28 (efisiensi tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Indeks Kualitas Air mencapai 125,94 Persen dan realisasi anggaran Rp. 1.530.619.490 atau mencapai 87,66 Persen maka efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 38,28.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,1	87,69	94,19	97.240.200	95.078.540	97,78

(IKU)							
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				94,19	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		97,78
Tingkat Efisiensi = -3,59 (efisiensi tidak tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Indeks Kualitas Udara mencapai 94,19 Persen dan realisasi anggaran Rp. 95.078.540 atau mencapai 97,78 Persen maka tingkat efisiensi sebesar -3,59 sehingga efisiensi tidak tercapai.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	79,18	85,24	107,65	398.906.750	388.466.429	97,80
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				107,65	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		97,80
Tingkat Efisiensi = 9,85 (efisiensi tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Indeks Kualitas Air Laut mencapai 107,65 Persen dan realisasi anggaran Rp. 238.619.581 atau mencapai 97,80 Persen maka efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 9,85.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2024		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2024		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Taman Kehati	Indeks	7,14	7,14	100	97.240.200	95.078.540	97,78

yang dikelola dan dibina							
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				100	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		97,78
Tingkat Efisiensi = 2,2 (efisiensi tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina mencapai 100 Persen dan realisasi anggaran Rp. 95.078.540 atau mencapai 97,78 Persen maka efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 2,2.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025		Persentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPA
		Target IKU	Capaian	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Emisi GRK Sektor Limbah	Persen	362,91	385	94,26	195.535.049	145.175.698	74,25
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja				94,26	Persentase Rata-Rata Penyerapan Anggaran		74,25
Tingkat Efisiensi = 20,01 (efisiensi tidak tercapai)							

Dengan capaian persentase indikator Emisi GRK Sektor Limbah mencapai 94,26 Persen dan realisasi anggaran Rp. 145.175.698 atau mencapai 74,25 Persen maka tingkat efisiensi sebesar 94,26 sehingga efisiensi anggaran atas kinerja tidak tercapai.

3. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - a) Kinerja Indeks Kualitas Air masuk dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, namun juga didukung oleh beberapa

program lainnya yaitu; Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pengendalian pencemaran dari sektor industri; Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat untuk peningkatan kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

- b) Kinerja Indeks Kualitas Udara masuk dalam Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terkait dengan konservasi lingkungan dan peningkatan tutupan lahan, namun juga didukung oleh beberapa program lainnya yaitu; Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c) Kinerja Indeks Kualitas Air Laut masuk dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, namun juga didukung oleh beberapa program lainnya yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pengendalian pencemaran dari sektor industri;
- d) Kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca masuk dalam Program Pengelolaan Persampahan yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Poin	68	12.072.807.252	-	9.924.345.321	-	82,20
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Poin	80	43.487.919	-	36.100.000	-	83,01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	Dokumen	1	37.287.919	1	30.250.000	100	81,13
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	6.200.000	1	5.850.000	100	94,35
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	80	10.365.146.653	80	8.362.030.821	100	80,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangannya	Orang/ Bulan	100	9.245.712.219	100	7.280.739.887	100	78,75
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1.101.725.000	1	1.064.181.500	100	96,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	Dok	1	17.709.434	1	17.109.434	100	96,61
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	1	10.750.963	1	10.000.000	100	93,01
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	10.750.963	1	10.000.000	100	93,01
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90	16.775.000	80	10.900.000	89	64,98
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	7.150.000	1	5.850.000	100	81,82
Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	9.625.000	15	5.050.000	60	52,47

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	630.910.885	100	586.936.975	100,00	93,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	5.247.103	1	5.245.750	100	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	94.293.310	1	86.023.280	100	91,23
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Paket	1	19.689.473	1	14.157.500	100	71,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok	48	18.000.000	48	18.000.000	100	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Dok	1	493.681.000	1	463.510.445	100	93,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	263.318.615	1	261.353.500	100	99,25
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	136.410.000	3	136.011.500	100	99,71
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	126.908.615	3	125.342.000	100	98,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	335.727.556	100	257.480.007	100,00	76,69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Bln	12	298.717.056	12	240.845.007	100	80,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	406.689.660	100	399.544.018	100	98,24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Unit	18	326.619.660	18	321.257.018	100	98,36

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Jabatan	atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	48	80.070.000	48	78.287.000	100	97,77
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan	%	100	218.874.000	100	186.167.561	100	85,06
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	%	100	180.000.000	100	150.283.781	100	83,49
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan/Kajian Ilmiah yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1	180.000.000	1	150.283.781	100	83,49
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	%	100	38.874.000	100	35.883.780	100	92,31
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dok	1	38.874.000	1	35.883.780	100	92,31
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan konsentrasi Parameter SO2 dan NO2	%	1	486.578.350	1	473.130.545	100	97,24
	Persentase penurunan konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH3 dan PO4-	%	1		1		100	
	Persentase penurunan konsentrasi Parameter PH, DO, BOD, COD, TSS, NO3,-N, T-Phospat, Fecal Coli	%	1		1		100	
	Persentase Inventarisasi GRK dari berbagai sektor	%	100		100		100	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase Peningkatan Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	%	100		100		100	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan passive sampler	%	100	307.403.350	100	304.267.390	100	98,98
	Persentase Data Kualitas Air Laut	%	100		100		100	
	Persentase kualitas data hasil pemantauan Air danau & Sungai	%	100		100		100	
	Persentase set pemenuhan data inventarisasi GRK	%	100		100		100	
	Persentase Lokasi yang dilakukan restorasi dan rehabilitasi	%	100		100		100	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler	Kab/Kota	13	210.074.000	13	208.791.806	100	99,39
	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode AQMS	Kota	1		1		100	
	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Air laut	Lokasi	2		2		100	
	Jumlah Lokasi Pemantauan Air Danau & Sungai	Lokasi	3		3		100	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	97.329.350	3	95.475.584	300	98,10
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan Kerusakan Pesisir dan Laut	%	100	7.310.000	100	7.309.010	100	99,99

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi rehabilitasi mangrove	Org	60	7.310.000	60	7.309.010	100	99,99
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi yang dilakukan restorasi dan rehabilitasi	%	40	171.865.000	40	161.554.145	100	94,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Lokasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Lokasi	1	79.240.000	1	78.540.000	100	99,12
Pelaksanaan Restorasi	Jumlah lokasi restorasi pesisir dan laut	Lokasi	1	8.595.000	1	1.054.685	100	12,27
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah lokasi pemantauan rehabilitasi lahan	Lokasi	1	84.030.000	1	81.959.460	100	97,54
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	100	97.240.200	100	95.078.540	100	97,78
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Kualitas Taman Kehati	%	100	97.240.200	100	95.078.540	100	97,78
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kab/kota yang dibina	Kab/Kota	1	12.379.200	1	11.629.200	100	93,94
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati diluar kawasan hutan yang dikelola dan dilakukan Pembinaan	Taman Kehati	1	84.861.000	1	83.449.340	100	98,34
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang mengelola B3 dan LB3 sesuai ketentuan	%	62	189.561.450	62	181.211.450	100	95,60
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	%	62	189.561.450	62	181.211.450	100	95,60

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah pelaku usaha yang terawasi	Pelaku Usaha	10	189.561.450	10	181.211.450	100	95,60
	Jumlah Laporan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kegiatan/Usaha	Dok	1		1	-	100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan	%	100	422.565.850	50	354.249.862	50	83,83
	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan	%	28,6		8,05		28	
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase dokumen lingkungan yang diuji untuk memperoleh rekomendasi kelayakan lingkungan	%	100	422.565.850	100	354.249.862	100	83,83
	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	28,6		8		28	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	20	66.540.900	110	61.765.360	550	92,82
	Jumlah Peserta Sosialisasi AmdalNet	Orang	80		80		100	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terawasi terhadap persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	Pelaku Usaha	40	356.024.950	40	292.484.502	100	82,15
	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang terbina terhadap Persetujuan Lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup	Pelaku Usaha	30		30		100	#DIV/0!
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota	%	23	35.044.850	23	22.469.000	100	64,11
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui	%	23	35.044.850	23	22.469.000	100	64
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah lembaga MHA yang didampingi	Profil	2	35.044.850	2	22.469.000	100	64,11
	Jumlah pendampingan pengakuan dan perlindungan calon MHA	MHA	1		1		100	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok lingkungan yang aktif	%	75	185.082.450	75	158.231.568	100	85,49

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Masyarakat yang terbina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	75	185.082.450	75	158.231.568	100	85,49
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (sekolah yang dibina)	Sekolah	10	46.878.900	20	39.279.252	200	83,79
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	2	41.060.000	2	40.575.931	100	98,82
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang menerapkan PRLH (Perilaku Ramah Lingkungan Hidup)	Kel	3	21.113.300	3	20.353.080	100	96,40
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Komunitas/Kelompok	6	76.030.250	6	58.023.305	100	76,32
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	%	45	131.199.265	50	86.422.432	111	65,87
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	%	45	131.199.265	100	86.422.432	222	65,87
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah individu/komunitas penggiat lingkungan hidup yang dibina (Kalpataru)	Orang/Komunitas	1	131.199.265	1	86.422.432	100	65,87
	Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai kinerja pengelolannya	Kab/Kota	2		4		200	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	melalui program TAPE							
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	%	100	30.460.000	100	30.160.000	100	99,02
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	%	100	30.460.000	100	30.160.000	100	99
Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Sulawesi tengah yang ditindaklanjuti	%	100	30.460.000	100	30.160.000	100	99,02
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	38,2	195.535.049	37,03	145.175.698	97	74,25
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelaporan pengelolaan Sampah	%	44	195.535.049	38,46	145.175.698	87	74,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Kantong Plastik dan Tong Sampah yang disediakan	Buah	1	18.935.000	1	18.754.250	100	99,05
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Penilaian Jakstrada Kabupaten/Kota	Dokumen	1	92.180.049	1	48.180.100	100	52,27
Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan penanganan sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Dokumen	1	46.431.000	1	44.331.000	100	95,48
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah	Kab/Kota	1	37.989.000	1	33.910.348	100	89,26

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				687.897.670		647.181.869		94,08
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Poin	68	389.760.220	80	376.482.026	118	96,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	185.580.740	100	173.081.057	100,00	93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	183.241.790	1	170.742.107	100	93,18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	2.338.950	1	2.338.950	100	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	92.880.000	1	92.101.989	100	99,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Bln	12	92.880.000	12	92.101.989	100	99,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	111.299.480	100	111.298.980	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan	Unit	3	61.129.980	3	61.129.980	100	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	26	50.169.500	26	50.169.000	100	100,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Kualitas Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	298.137.450	100	270.699.843	100	90,80
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Permohonan Pengujian Sampel yang tertangani	%	100	298.137.450	100	270.699.843	100	91
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dok	700	298.137.450	1.164	270.699.843	166	90,80

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp. 14.752.846.385,81 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.303.823.846 atau 83,40% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.449.022.539,81-. Realisasi anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.752.846.385,81	12.303.823.846	83,40	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.072.807.251,81	9.924.345.321	82,20	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.487.919	36.100.000	83,01	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.287.919	30.250.000	81,13	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.200.000	5.850.000	94,35	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.365.146.653,16	8.362.030.821	80,67	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.245.712.219,16	7.280.739.887	78,75	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.101.725.000	1.064.181.500	96,59	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.709.434	17.109.434	96,61	100
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10.750.963	10.000.000	93,01	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10.750.962,99	10.000.000	93,01	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.775.000,00	10.900.000	64,98	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kepegawaian	7.150.000,00	5.850.000	81,82	100
Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	9.625.000	5.050.000	52,47	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.910.885,26	586.936.975	93,03	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.247.103	5.245.750	99,97	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.293.309,76	86.023.280	91,23	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.689.472,50	14.157.500	71,90	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	18.000.000	100,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.681.000	463.510.445	93,89	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.318.615	261.353.500	99,25	100
Pengadaan Mebel	136.410.000	136.011.500	99,71	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.908.615,4	125.342.000	98,77	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.727.556	257.480.007	76,69	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.717.056	240.845.007	80,63	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.010.500	16.635.000	44,95	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.689.660,00	399.544.018	98,24	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	326.619.660	321.257.018	98,36	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.070.000	78.287.000	97,77	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	0,00	-	0,00	0
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	218.874.000	186.167.561	85,06	100
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	180.000.000	150.283.781	83,49	100
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	180.000.000	150.283.781	83,49	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	38.874.000	35.883.780	92,31	100
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	38.874.000	35.883.780	92,31	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	486.578.350	473.130.545	97,24	100
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	307.403.350	304.267.390	98,98	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	210.074.000	208.791.806	99,39	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	97.329.350	95.475.584	98,10	100
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.310.000	7.309.010	99,99	100
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	7.310.000	7.309.010	99,99	100
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	171.865.000	161.554.145	94,00	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	79.240.000	78.540.000	99,12	100
Pelaksanaan Restorasi	8.595.000	1.054.685	12,27	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	84.030.000	81.959.460	97,54	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	97.240.200	95.078.540	97,78	100
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	97.240.200	95.078.540	97,78	100
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.379.200	11.629.200	93,94	100
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	84.861.000	83.449.340	98,34	100
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	189.561.450	181.211.450	95,60	100
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	189.561.450	181.211.450	95,60	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	189.561.450	181.211.450	95,60	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	422.565.850	354.249.862	83,83	
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	422.565.850	354.249.862	83,83	100
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	66.540.900	61.765.360	92,82	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	356.024.950	292.484.502	82,15	100
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	35.044.850	22.469.000	64,11	100
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	35.044.850	22.469.000	64,11	100
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	35.044.850	22.469.000	64,11	100
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	185.082.450	158.231.568	85,49	100
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	185.082.450	158.231.568	85,49	100
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	46.878.900	39.279.252	83,79	100
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	41.060.000	40.575.931	98,82	100
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.113.300	20.353.080	96,40	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	76.030.250	58.023.305	76,32	100
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	131.199.265	86.422.432	65,87	100
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	131.199.265	86.422.432	65,87	100
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	131.199.265	86.422.432	65,87	100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.460.000	30.160.000	99,02	100
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	30.460.000	30.160.000	99,02	100
Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	30.460.000	30.160.000	99,02	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	195.535.049	145.175.698	74,25	100
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	195.535.049	145.175.698	74,25	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	18.935.000	18.754.250	99,05	100
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	92.180.049	48.180.100	52,27	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	46.431.000	44.331.000	95,48	100
Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	37.989.000	33.910.348	89,26	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	389.760.220	376.482.026	96,59	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.580.740	173.081.057	93,26	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.241.790	170.742.107	93,18	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.338.950	2.338.950	100,00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.880.000	92.101.989	99,16	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.880.000	92.101.989	99,16	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.299.480	111.298.980	100,00	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.129.980	61.129.980	100,00	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.169.500	50.169.000	99,999	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	-	-	0,00	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	298.137.450	270.699.843	90,80	100
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	298.137.450	270.699.843	90,80	100
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	298.137.450	270.699.843	90,80	100

3.3 Inovasi

Salah satu Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah Penggunaan Mesin Pirolisis dan Pembangunan “Sulteng Recycle Center” sebagai pusat daur ulang sampah dengan menggunakan pirolisis yang mengolah sampah agar dapat memproduksi minyak solar dan bahan lainnya.



Foto : Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdiskusi tentang Mesin Pirolisis setelah peresmian Sulteng Recycle Center

Pembangunan SRC ini diharapkan dapat :

- Mengurangi Volume Sampah ke TPA: Mengolah sampah di tingkat lokal sehingga lebih sedikit sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Menghasilkan Produk Bernilai Ekonomis: sampah anorganik (seperti plastik) diolah menjadi solar, paving, produk kerajinan, atau bahan baku industri, menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

- Mendukung Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Memfasilitasi pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah secara efektif.



Foto : Pegawai DLH Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Pelatihan Penggunaan Mesin Pirolisis

3.4 Penghargaan

Penghargaan yang berhasil diperoleh oleh pemerintah Sulawesi Tengah pada tahun 2025 adalah Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diraih oleh :

1. SMPN 1 Banawa
2. SMKN 1 Toribulu
3. MAN 1 Parigi
4. SMPN 1 Sigi
5. SMPN Model Terpadu Madani
6. SMPN 19 Palu
7. SMAN 3 Palu

Adiwiyata secara internasional disebut pula dengan Green School adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat

dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif.



Foto : Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH berfoto bersama Perwakilan Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025



Foto : Pembina/Pendamping Sekolah Adiwiyata Provinsi dari DLH Provinsi Sulawesi Tengah bersama Salah Satu Perwakilan Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025 dari Provinsi Sulawesi Tengah

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh tiga program utama dan satu program pendukung sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025 - 2029. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa dari 5 IKU telah tercapai 3 (tiga) target IKU dan 2 (dua) target IKU belum tercapai. Meskipun demikian capaian 2 IKU masih pada level sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$). Pencapaian ini sebagai hasil dari koordinasi dan komitmen yang terlihat dari kepedulian para pimpinan dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Proses perencanaan dan persiapan yang matang, seperti terlihat dari adanya pelaksanaan kegiatan RAPIM TEPRRA, Rapat Internal, serta Raker Pimpinan terkait anggaran, juga turut mendukung pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak cukup hanya pada proses perencanaan dan persiapan, keberhasilan pencapaian ini juga disebabkan oleh adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi setiap kegiatan yang ada.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja pada tahun 2025, tiga sasaran strategis telah tercapai. Jika disandingkan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029, tingkat capaian nilai Indeks Kualitas Udara 94,19 Persen, Indeks Kualitas Air Laut 107,65 persen, Indeks Kualitas Air 125,94 Persen sedangkan tingkat capaian Persentase Taman Kehati yang dikelola dan dibina juga 100 persen. Tingkat capaian untuk Emisi GRK sektor limbah kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Emisi GRK sektor limbah tahun sebelumnya 526 GgCO₂Eq sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 385

GgCO₂Eq. Hal ini menandakan bahwa terjadi kinerja penurunan Emisi GRK sektor limbah mengalami peningkatan 26,80 persen.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari upaya mendukung peningkatan lingkungan hidup yang semakin baik.

4.2 Saran

Dalam rangka peningkatan kinerja ditahun depan maka perlu dilakukan :

1. Penambahan jumlah titik lokasi pemantauan yang dilakukan sehingga hasilnya dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan dari Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Perlu adanya kegiatan inventarisasi dan pengawasan terhadap industri-industri di Sulawesi Tengah sebagai salah satu sumber pencemaran sungai, dimana industri-industri tersebut melakukan pembuangan air limbahnya ke sungai. Kegiatan industri telah melakukan pelaporan pengolahan dan pengelolaan air limbahnya sebelum dibuang ke sungai, namun demikian laporan tersebut tetap butuh verifikasi lapangan untuk membuktikan validitasnya;
3. Perlu adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Peningkatan Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di lingkungan hidup.
5. Optimalisasi pelaksanaan program sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi

di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

GUBERNUR,

H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS,



Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	65,59 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,10 Poin
3	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	79,18 Poin
4	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	28,5 Persen

Jumlah Anggaran : Rp 14.416.929.489

	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	51.944.300	APBD
02	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	481.474.210	APBD
03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	99.955.750	APBD
04	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	130.521.450	APBD
05	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	484.860.750	APBD
06	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait PPLH	70.062.752	APBD

07	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	217.296.150	APBD
08	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	218.426.100	APBD
09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.818.300	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	430.505.700	APBD
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.075.065.029	APBD

Palu, 30 Januari 2025

GUBERNUR,



H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS,



Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHID IRAWAN, S.STP**
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197805251997031001

SEKRETARIS,

WAHID IRAWAN, S.STP
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197803301997121001



**PERJANJIAN KINERJA
ESELON III TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SEKRETARIS**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	68 Poin
1.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	82 Poin
1.2	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 Laporan
1.3	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Laporan Pengelolaan Aset Yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
1.4	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin
1.5	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan
1.6	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
1.7	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Barang pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.618.649.145,50	APBD
1,1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.581.255	APBD
1,2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.479.108.518,74	APBD
1,3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.925.000	APBD
1,4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.650.000	APBD
1,5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.801.915,76	APBD
1,6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.265.456	APBD

1,7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

352.317.000

APBD

Palu, 3 Februari 2025

Kepala Dinas



Dr. KOPIE M. I. PATIRO., SH., MH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19780525 199703 1 001

Sekretaris

WAHID IRAWAN, S.STP

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19780330 199712 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURFAIDAH, S.Sos., M.AP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WAHID IRAWAN, S.STP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025

SEKRETARIS,


WAHID IRAWAN, S.STP
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197803301997121001

KEPALA SUB BAGIAN,

NURFAIDAH, S.Sos., M.AP
Pembina, IV/a
NIP. 197001231993032008



PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan
3	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Orang/Bulan
4	Terpenuhinya kewajiban pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
5	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
6	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
7	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.331.255	APBD
2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.250.000	APBD
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.418.063.488,74	APBD
4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.041.700.000	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.345.030	APBD
6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.925.000	APBD

7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

292.944.000

APBD

Palu, 3 Februari 2025

Sekretaris



WAHID IRAWAN, S.STP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19780330 199712 1 001

Kepala Sub Bagian

NUREIDAH, S.Sos., M.AP
Pembina, IV/a
NIP. 19700123 199303 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ESTHER BITTIKAKA, S.AP**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WAHID IRAWAN, S.STP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **3** Februari 2025

SEKRETARIS,

Plt. KEPALA SUB BAGIAN,

WAHID IRAWAN, S.STP
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197803301997121001

ESTHER BITTIKAKA, S.AP
Penata Muda, III/a
NIP. 198205212010012014



PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
2	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang
3	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
4	Tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
5	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket
6	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen
7	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan
8	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
9	Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan/atau dibayarkan pajaknya	18 Unit
10	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 Unit

	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	31.700.000	APBD
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.950.000	APBD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.435.579	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.930.553	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.783,76	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.590.456	APBD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.675.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.827.000	APBD
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.490.000	APBD



 Sekretaris
WAHID IRAWAN, S.STP
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 19780330 199712 1 001

Palu, **3** Februari 2025

Plt. Kepala Sub Bagian



Esther Bittikaka, S.AP
 Penata Muda, III/a
 NIP. 19820521 201001 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI RAHMADANI, ST.,MT**
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197805251997031001

KEPALA BIDANG,

ANDI RAHMADANI, ST., MT
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 196911111998032008



PERJANJIAN KINERJA
ESELON III TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
BIDANG TATA LINGKUNGAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan	100 Persen
1,1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas KLHS Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	100 Persen
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan	50 Persen
2,1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pembinaan/pengawasan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pelaku usaha yang dibina/diawasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup	28.6 Persen
3	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi Ketentuan	Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan	100 Persen
3,1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas uji kelayakan dokumen lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang diuji untuk memperoleh rekomendasi kelayakan lingkungan	100 Persen
4	Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	100 Persen
4,1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	100 Persen

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	51.944.300	APBD
1,2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	51.944.300	APBD
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	484.860.750	APBD
2,1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	484.860.750	APBD

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

49.818.300

APBD

- 3,1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi

49.818.300

APBD

Palu, 3 Februari 2025

Kepala Bidang



Kepala Dinas

Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780525 199703 1 001

ANDI RAHMADANI, ST., MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19691111 199803 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDY WAHYUDI, SH., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025



Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197805251997031001

KEPALA BIDANG,

DEDY WAHYUDI, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 198609262010011005



PERJANJIAN KINERJA
ESELON III TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3,
PENINGKATAN KAPASITAS DAN DATA LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terkendalnya Pencemaran B3 dan LB3	Persentase Pelaku Usaha yang mengelola B3 dan LB3 sesuai ketentuan	62 Persen
1.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	62 Persen
2	Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup	Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota	23 Persen
2.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya MHA yang diakui	Persentase MHA yang diakui	23 Persen
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kelompok lingkungan yang aktif	76 Persen
3.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pembinaan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Masyarakat yang terbina dalam pengelolaan lingkungan hidup	76 Persen
4	Meningkatnya penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	45 Persen
4.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Event Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	45 Persen
5	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	38,2
5.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan sampah	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelaporan pengelolaan Sampah	44 Persen

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	130.521.450	APBD
1.1 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130.521.450	APBD
2 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	70.062.750	APBD

2,1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	70.062.750	APBD
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	217.296.150	APBD
3,1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	217.296.150	APBD
4.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	218.426.100	APBD
4,1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	218.426.100	APBD
5.	Program Pengelolaan Persampahan	430.505.700	APBD
5,1	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	430.505.700	APBD

Palu, 3 Februari 2025



Kepala Dinas
Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19780525 199703 1 001

Kepala Bidang

DEDY WAHYUDI, SH., MH
 Pembina, IV/a
 NIP. 198609262010011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. NATSIR A. MANGGE, S.Hut**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025



Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197805251997031001

KEPALA BIDANG,

MOH. NATSIR A. MANGGE, S.Hut
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197511202006041006



PERJANJIAN KINERJA
ESELON III TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase penurunan konsentrasi Parameter SO2 dan NO2	1 Persen
		Persentase penurunan konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH3 dan PO4-P	1 Persen
		Persentase penurunan konsentrasi Parameter PH, DO, BOD, COD, TSS, NO3-N, T-Phospat, Fecal Coli	1 Persen
		Persentase Peningkatan Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	100 Persen
1.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas data hasil pemantauan kualitas udara	Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan passive sampler	100 Persen
1.2	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas data hasil pemantauan kualitas air laut	Persentase Data Kualitas Air Laut	100 Persen
1.3	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas data hasil pemantauan Air danau & Sungai	Persentase kualitas data hasil pemantauan Air danau & Sungai	100 Persen
1.4	Sasaran Kegiatan : Terkendalinya Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	100 Persen
2	Meningkatnya kelestarian keanekaragaman hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100 Persen
2.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Taman Kehati	Persentase Kualitas Taman Kehati	100 Persen
3	Meningkatnya inventarisasi GRK dari berbagai sektor	Persentase Inventarisasi GRK dari berbagai sektor	100 Persen
3.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Data inventarisasi GRK	Persentase set pemenuhan data inventarisasi GRK	100 Persen

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	481.474.210	APBD
1.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	307.403.500	APBD
1.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	45.734.710	APBD
1.3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	128.336.000	APBD
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	99.955.750	APBD

2,1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Provinsi



Kepala Dinas

Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780525 199703 1 001

99.955.750 APBD

Palu, 3 Februari 2025

Kepala Bidang

MOH. NATSIR A. MANGGE, S.Hut
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19751120 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. SITTI NURBAYA**
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025



Dr. YOPIE M. I. PATIRO, SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197805251997031001

KEPALA UPT LABORATORIUM,

Dra. SITTI NURBAYA
Penata Tkt I, III/d
NIP. 196709241996032001



PERJANJIAN KINERJA
ESELON III TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Kualitas Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	100 Persen
1.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Permohonan Pengujian Sampel yang Tertangani	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan pada UPT Laboratorium lingkungan hidup	Indeks Reformasi Birokrasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	68 Poin
2.1	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan
2.2	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
2.3	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
2.4	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Barang pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	106.999.000	APBD
1,1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	106.999.000	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	456.415.883	APBD
2,1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.861.113	APBD
2,2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.154.770	APBD
2,3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.680.000	APBD

2,4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

109.720.000

APBD

Palu, 3 Februari 2025

Kepala UPT



Kepala Dinas

Dr. YOPIE M. I. PATIRO., SH., MH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19780525 199703 1 001

Dra. SITTI NURBAYA

Penata Tkt I, III/d

NIP. 19670924 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IWAN, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dra. SITI NURBAYA**
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 3 Februari 2025

KEPALA UPT LABORATORIUM,


Dra. SITI NURBAYA
Penata Tkt I, III/d
NIP. 196709241996032001

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA,


IWAN, SE
Penata Muda Tkt I, III/b
NIP. 196905041989031014



PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
KASUBAG TATA USAHA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket
2	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket
3	Tersedianya mebel kantor	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket
4	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit
5	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan
6	Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan/atau dibayarkan pajaknya	2 Unit
7	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.722.163	APBD
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.138.950	APBD
3 Pengadaan Mebel	18.254.170	APBD
4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.900.600	APBD
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.680.000	APBD
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.500.000	APBD

Palu, **3** Februari 2025

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Dra. SITI NURBAYA
Penata Tkt I, III/d
NIP. 19670924 199603 2 001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

IWAN, SB
Penata Muda Tkt I, III/b
NIP. 19690504 198903 1 007

LAMPIRAN DOKUMENTASI







